

1

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KABUPATEN SEMARANG PADA OBYEK WISATA PALAGAN AMBARAWA

Ahmad Hanif Nur R¹, Dyah Lituhayu², Titik Djumiarti³

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1296

Telpon (024) 7465407 Faksimili (024) 7465405

Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Semarang Regency is one area that has great potential in the tourism sector. However, the development of tourism in Semarang Regency in the last 2 years can be have not been maximized. This happened because of the Covid-19 pandemic that entered Indonesia in early 2020. As a result, the targets of the tourism development policy in Semarang Regency could not be achieved, such as not achieving an increase in the number of tourist visits and increasing regional income in the tourism sector. This research aims to determine the implementation of policies in Semarang Regency, especially at the Palagan Ambarawa tourism object during the covid-19 pandemic, as well as analyze the factors that hinder the implementation of policies during the pandemic. This research uses a qualitative descriptive approach. Data collection techniques through interviews, observation, and documentation as well as using domain and taxonomy analysis. Based on the results of the study indicate that the implementation of tourism development policies in Semarang Regency at Palagan Ambarawa has not been fully implemented successfully. When viewed from the standards and policy objectives, tourism development in Palagan Ambarawa has not been achieved optimally. Then there are also several obstacles such as a lack of manpower, a lack of budget, and the Covid-19 pandemic that hinders the implementation of policies. The recommendation in this study is that the tourism office can collaborate with private companies in Semarang Regency, in order to get budget assistance in carrying out tourism development.

Keywords: Implementation, Policy, Tourism Development

¹ Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

² Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

³ Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Diponegoro

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Semarang biasa dikenal dengan julukan “Bumi Serasi” ini terletak di daerah yang dapat dikatakan strategis, yakni berada di jalur utama Semarang-Solo/Yogyakarta (JOGLOSEMAR) yang merupakan jalur padat dan banyak dilewati orang. Jika dilihat secara geografis, sebagian besar wilayah Kabupaten Semarang merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 500m diatas permukaan laut dengan suhu udara berkisar antara 21°C s/d 28°C, sehingga menjadikan daerah Kabupaten Semarang memiliki pesona alam yang indah dan asri. Pemandangan alam seperti pegunungan-pegunungan banyak di jumpai di beberapa wilayah Kabupaten Semarang, seperti Gunung Ungaran yang tampak jelas dilihat dari kota Ungaran yang merupakan pusat kota Kabupaten Semarang. Pesona alam lainnya yang dimiliki oleh Kabupaten Semarang diantaranya yakni curug/air terjun, hamparan hutan yang luas, pemandangan alam yang indah serta keanekaragaman flora dan fauna yang melimpah.

Berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Semarang tidak seimbang dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang dalam 2 tahun terakhir dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini terjadi karena adanya pandemi

Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk membatasi segala kegiatan dan aktivitas masyarakat dengan diterbitkannya PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Akibatnya banyak fasilitas-fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan akhirnya ditutup, seperti beberapa obyek pariwisata di Kabupaten Semarang. Sehingga kondisi tersebut menyebabkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah pendapatan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Semarang.

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan dan Jumlah Pendapatan Daerah di Sektor Wisata Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Pengunjung	Pendapatan Daerah
2021	1.451.887	Rp. 17.229.195.444
2020	1.873.794	Rp. 34.369.204.021
2019	3.510.280	Rp. 93.165.271.609
2018	3.381.780	Rp. 350.922.310.812
2017	2.822.421	Rp. 407.123.301.240

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang terbanyak adalah pada tahun 2019 atau sebelum adanya pandemi, yakni sebanyak 3.510.280 wisatawan. Kemudian pada 2 tahun terakhir kunjungan wisatawan mengalami penurunan hampir 50%, menjadi 1.873.794 pada tahun 2020 dan 1.451.887 pada tahun

2021. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan tersebut tidak terlepas karena adanya pandemi Covid-19, yang juga berdampak pada menurunnya jumlah pendapatan daerah di sektor pariwisata. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 pendapatan daerah dari sektor pariwisata sebesar Rp. 93.165.271.609. Kemudian pada tahun 2020 dan tahun 2021 pendapatan dari sektor pariwisata menurun cukup drastis, menjadi Rp. 34.369.204.021 dan Rp. 17.229.195.444.

Kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, tidak tercapainya target kunjungan wisatawan, serta menurunnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata, harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Semarang. Agar potensi pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Semarang dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal, sehingga Kabupaten Semarang dapat menjadi daerah tujuan wisatawan untuk berwisata.

Disinilah peran pemerintah daerah sebagai pembuat serta pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata, karena sektor pariwisata memerlukan suatu strategi dengan pola pengembangan kepariwisataan yang terencana dan tersusun agar potensi yang dimiliki bisa dikembangkan secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan

oleh pemerintah daerah Kabupaten Semarang untuk mengembangkan pariwisata adalah dengan dikeluarkannya Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025. Kebijakan pengembangan pariwisata tersebut dilakukan secara bertahap setiap tahunnya, untuk jangka waktu 5 tahun.

Kebijakan pengembangan pariwisata daerah dalam penelitian ini berupa obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Pengembangan obyek wisata ini diharapkan mampu menjadi pengungkit bagi pengembangan suatu kawasan destinasi pariwisata. Obyek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Semarang meliputi kawasan Candi Gedongsongo, Pemandian Muncul, kawasan Bukit Cinta dan Palagan Ambarawa. Akan tetapi peneliti berfokus pada pengembangan pariwisata di obyek wisata Palagan Ambarawa. Pemilihan obyek wisata tersebut dikarenakan Palagan Ambarawa merupakan obyek wisata dengan jumlah kunjungan wisatawan paling sedikit dalam 5 tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2. Jumlah Pengunjung pada Obyek Wisata yang dikelola Dinas Pariwisata

Obyek Wisata/UPTD	Jumlah Pengunjung (Tahun)					Total
	2017	2018	2019	2020	2021	
Candi Gedong Songo	1.146.192	2.332.458	680.915	321.071	150.375	4.631.011
Pemandian Muncul	419.955	532.008	173.742	29.546	42.323	1.197.574
Bukit Cinta	144.114	177.519	0	138.731	61.308	521.672
Palagan Ambarawa	125.553	149.586	41.476	12.248	567	329.430

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka, 2021

Pariwisata di Kabupaten Semarang khususnya pada Obyek Wisata palagan Ambarawa dapat dikatakan belum berkembang, jika dilihat dari pencapaian-pencapaian selama 5 tahun terakhir ini. Hal tersebut tidak sebanding dengan anggaran yang sudah dikeluarkan untuk melakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang. Dimana dalam 2 tahun terakhir anggaran untuk pengembangan pariwisata adalah sebesar Rp. 4.697.281.000,00 untuk tahun 2020, dan Rp. 15.003.993.500,00 untuk tahun 2021.

Selain dengan menyediakan anggaran untuk pengembangan pariwisata, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025. Dengan sasaran dari Perda Nomor 8 Tahun 2019 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkualitas dan rata-rata lama tinggalnya;
- b. meningkatnya pendapatan masyarakat;
- c. meningkatnya pendapatan daerah dari sektor Pariwisata;

Pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Semarang. Terlebih lagi saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19, yang memaksa dibatasinya segala aktivitas dan kegiatan masyarakat serta ditutupnya beberapa fasilitas umum yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Akibatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Semarang mengalami penurunan serta menurunnya pendapatan daerah dari pariwisata. Maka dari itu muncul pertanyaan penelitian, **bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Semarang dalam menyikapi penurunan jumlah wisatawan pada saat pandemi Covid-19 ?**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Semarang pada Obyek Wisata Palagan Ambarawa selama masa pandemi Covid-19 ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Semarang pada Obyek Wisata Palagan Ambarawa selama masa pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian (*research question*) yang telah diajukan, yaitu untuk mengetahui serta mendeskripsikan proses implementasi kebijakan dalam upaya mengembangkan pariwisata di Kabupaten Semarang pada Obyek Wisata Palagan Ambarawa selama masa pandemi Covid-19. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang pada Obyek Wisata Palagan Ambarawa selama pandemi Covid-19.

D. Kerangka Teori

1. Administrasi Publik

Administrasi publik ialah sebuah studi yang mempelajari tentang segala urusan organisasi, yang dijalankan oleh manusia dan dibantu dengan berbagai

peralatan penunjang yang kemudian bisa diterapkan dalam pemerintahan guna menggapai tujuan secara efektif serta efisien. Oleh sebab itu administrasi memiliki peran yang penting di kehidupan sehari-hari, seperti pada segala aktivitas organisasi. Dengan adanya administrasi maka sebuah organisasi dapat menjalankan segala aktivitasnya guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Seperti halnya pada negara Indonesia yang merupakan suatu organisasi besar, maka organisasi tersebut perlu dikelola melalui berbagai kegiatan administrasi, dimana kendali dipegang oleh pemerintah. Maka administrasi disini berperan untuk mencapai tujuan negara, yang salah satunya yaitu untuk mensejahterakan rakyat dengan melalui kebijakan.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik ialah segala suatu urusan yang dijalankan oleh pemerintah guna menyelesaikan beragam masalah yang ada dalam masyarakat serta untuk menggapai tujuan-tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Selain itu yang berperan dalam suatu kebijakan tidak hanya pemerintah saja, namun masih ada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan serta pelaksanaan kebijakan.

3. Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan adalah tahapan yang krusial pada suatu proses kebijakan, dimana kegiatannya berupa segala tindakan dari implementor kebijakan untuk menjalankan kebijakan/program yang telah ditentukan sebelumnya guna mencapai tujuan dari kebijakan tersebut, karena pada tahap ini berpengaruh terhadap hasil akhir dari suatu kebijakan. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang menggunakan model implementasi dari Van Metter & Van Horn yakni Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Para Pelaksana, Komunikasi Antar Organisasi dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.
4. Pengembangan Pariwisata
Pengembangan pariwisata adalah suatu proses atau langkah secara bertahap dengan tujuan untuk menciptakan dan menghasilkan pariwisata yang lebih baik lagi kedepannya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, secara analisis deskriptif berarti memiliki

keterkaitan dengan data untuk variabel suatu penelitian. Data dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara, serta data resmi yang diperoleh melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang, maupun artikel-artikel ilmiah yang memiliki topik serupa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Subjek tersebut meliputi unsur pelaksana kebijakan maupun sasaran dari kebijakan, seperti pelaku usaha, masyarakat, dan wisatawan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah melalui suatu peraturan atau program-program yang telah disusun sebelumnya, guna mewujudkan tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut. Pada bagian ini akan dijabarkan hasil dan pembahasan terkait implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada obyek Wisata Palagan Ambarawa.

Palagan Ambarawa termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Semarang (KSPK), hal tersebut dikarenakan Palagan Ambarawa memiliki potensi untuk dilakukannya pengembangan pariwisata. Kondisi tersebut sebelumnya telah dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019

Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025, pada pasal 14 (ayat 1) huruf b.

A. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Terdapat perbedaan persepsi antara Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dan Kepala UPTD Dinas Pariwisata terkait pemahaman regulasi pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang. Seperti menurut Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata dalam pengembangan pariwisata berpedoman pada Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025. Kemudian ada juga SK Kepala Dinas Pariwisata Nomor 556/0196/KEP/III/2022 terkait penetapan daya tarik wisata di Kabupaten Semarang, sebagai pedoman pelaksanaan pengembangan pariwisata di Palagan Ambarawa. Sementara menurut Kepala UPTD Dinas Pariwisata berpedoman pada Perda Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang

mengelola pendapatan dari sektor pariwisata. Sedangkan koordinator lapangan selaku pengelola obyek wisata Palagan Ambarawa tidak mengetahui adanya regulasi atau peraturan terkait pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang, khususnya pada pengembangan obyek wisata Palagan Ambarawa.

Perbedaan persepsi antar pelaksana tersebut dikarenakan tidak semua pelaksana memahami dan mengetahui regulasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang. Meskipun terjadi perbedaan persepsi, namun para pelaksana pengembangan pariwisata di Dinas Pariwisata memahami tujuan dilakukannya pengembangan pariwisata yang dilakukan di Kabupaten Semarang. Yakni untuk memberikan fasilitas yang terbaik bagi wisatawan. Selain itu juga untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata. Sehingga dengan berkembangnya fasilitas pariwisata dapat meningkatkan minat pengunjung untuk berwisata, serta dapat meningkatkan pendapatan daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan sasaran yang ditetapkan dalam

Perda Nomor 8 Tahun 2019 pasal 2 ayat (7), antara lain yakni meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.

Akan tetapi berbanding terbalik dengan keadaan di lapangan, bahwasanya tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut tidak dapat tercapai. Dimana jumlah pengunjung dan jumlah pendapatan dari sektor pariwisata justru mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena adanya pandemi Covid-19. Dimana tujuan/sasaran dari kebijakan tersebut tidak dapat tercapai. Karena selama pandemi pengunjung/wisatawan yang datang ke Kabupaten Semarang selalu mengalami penurunan. Hal tersebut berdampak pada tidak tercapainya target dan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Semarang dari sektor pariwisata. Selain itu dampak pandemi juga dirasakan oleh pelaku-pelaku usaha yang ada di sekitar obyek pariwisata. Salah satunya adalah pelaku usaha yang terdapat di obyek wisata Palagan Ambarawa. Dampak secara ekonomi dialami langsung oleh pelaku usaha tersebut, yakni

terkait penurunan pendapatannya. Karena selama pandemi obyek wisata Palagan Ambarawa sempat mengalami penutupan total.

Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi tercapainya tujuan/sasaran dari pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata tersebut. Upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengikuti arahan dari Pemerintah Pusat. Arahan yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat dalam menghadapi pandemi adalah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat pada obyek wisata. Seperti mencuci tangan pakai sabun sebelum memasuki kawasan obyek wisata, memakai masker, menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Kemudian juga wisatawan diwajibkan sudah vaksin dan terdata dalam aplikasi PeduliLindungi, agar tercipta lingkungan yang sehat dan pengunjung lainnya akan merasa aman ketika sedang berwisata. Penerapan protokol kesehatan tersebut juga merupakan bentuk pengembangan pariwisata, agar pariwisata bisa bertahan dan berkembang selama masa pandemi Covid-19. Namun penerapan

protokol kesehatan tersebut pada obyek wisata Palagan Ambarawa tidak sepenuhnya diterapkan. Banyak wisatawan yang tidak memakai masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke kawasan Palagan Ambarawa. Selain itu juga kurangnya pengawasan dan kurang tegasnya pengelola yang ada di Palagan Ambarawa dalam mengontrol perilaku wisatawan selama berada di Palagan Ambarawa, sehingga protokol kesehatan tidak berjalan dengan maksimal.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya dalam membantu berjalannya pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang, khususnya pada obyek wisata Palagan Ambarawa masih belum efektif. Padahal sumber daya merupakan komponen penting yang harus disediakan agar kebijakan dapat berhasil dijalankan.

Seperti pada kebutuhan sumber daya manusia dalam menjalankan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang yang masih mengalami kekurangan, dimana dibutuhkan 9 orang untuk tenaga outsourcing tetapi yang tersedia hanya 1 tenaga saja.

Sedangkan untuk kualitas sumber daya manusia dapat dikatakan sudah mencukupi kebutuhan, dengan adanya program pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mengelola obyek wisata.

Sementara itu untuk sumber daya finansial atau anggaran dalam melaksanakan pengembangan pariwisata masih kurang memadai. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi Covid-19, yang mendesak adanya penyesuaian (*refocusing*) anggaran. Sehingga pelaksanaan pengembangan pariwisata menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya oleh Dinas Pariwisata. Hal tersebut kemudian menjadi kendala bagi Dinas Pariwisata dalam melakukan penambahan maupun pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pada beberapa obyek wisata. Seperti pada obyek wisata Palagan Ambarawa, yang masih memiliki kekurangan dan memerlukan pengembangan lebih lanjut pada beberapa fasilitas dan daya tarik yang ada.

3. Karakteristik Organisasi

Pihak yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang terdiri dari organisasi formal dan organisasi informal. Pihak formal yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang, khususnya pada obyek wisata Palagan Ambarawa antara lain seperti Dinas Pekerjaan Umum berperan dalam membantu menyediakan akses jalan menuju tempat wisata, Dinas Perhubungan membantu menyediakan rambu-rambunya, Dinas Lingkungan Hidup yang menyediakan sanitasi, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membantu memfasilitasi perijinan bagi para investor untuk berinvestasi dalam kepariwisataan di Kabupaten Semarang.

Pihak informal yang terlibat seperti agen-agen dan biro perjalanan wisata berperan dalam membantu mendatangkan wisatawan, investor berperan dalam mendirikan usaha pariwisata di Kabupaten Semarang, serta keterlibatan pihak TNI dalam membantu menyimpan barang-barang yang ada di Palagan Ambarawa selama masa revitalisasi. Semua pihak tersebut

saling berperan dan mendukung satu sama lain demi terlaksanakannya pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang.

4. Sikap Para Pelaksana

Sikap dari para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang, khususnya pada obyek wisata Palagan Ambarawa bukan menjadi hambatan. Hal ini disebabkan karena para pelaksana tidak pernah menolak dan selalu mengikuti instruksi dalam melaksanakan kebijakan terkait pengembangan pariwisata tersebut. Kemudian setiap bidang di Dinas Pariwisata memiliki anggarannya masing-masing, dan bila akan menjalankan suatu pengembangan maka perlu dilakukan koordinasi terlebih dahulu.

5. Komunikasi Antar Organisasi

Dinas Pariwisata dalam melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang telah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Seperti komunikasi dengan pengelola wisata, UPTD, masyarakat/pelaku usaha wisata, serta dinas-dinas yang terkait dalam pengembangan pariwisata secara

intens. Kemudian jika terjadi suatu hal di lapangan, koordinator lapangan tidak bisa memutuskan secara langsung, harus menyampaikan hal tersebut ke bagian UPTD. Kemudian dari UPTD akan menyampaikannya ke internal dinas.

Namun masih terdapat perbedaan pendapat antara kepala UPTD dan pengelola obyek wisata Palagan Ambarawa dalam melakukan penambahan sarana dan prasarana di dalam obyek wisata Palagan Ambarawa. Dimana menurut kepala UPTD bahwa selama masih menyangkut urusan yang ada di Dinas Pariwisata, maka akan langsung ditindaklanjuti. Namun pengelola obyek wisata sebelumnya pernah menyampaikan usulan terkait penambahan ruangan untuk rapat. Akan tetapi penambahan ruangan rapat tersebut sampai saat penelitian ini disusun masih belum terealisasi.

Kemudian terkait mekanisme koordinasi dalam menjalankan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang, Dinas Pariwisata tetap melakukan koordinasi dengan Dinas lainnya. Seperti menjalin koordinasi dengan

Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup, yang sebelumnya telah dikoordinasikan melalui forum musrenbang. Koordinasi dan komunikasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi dari kepala daerah.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik saling mendukung dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang. Seperti dalam aspek sosial yang sudah berjalan dengan baik dan tidak ada kendala. Dimana masyarakat memiliki keinginan untuk dilakukannya pengembangan pariwisata. Masyarakat sekitar obyek wisata Palagan Ambarawa juga dilibatkan dalam kegiatan pengembangan, seperti dalam pembangunan masjid dan sebagai pengelola serta pelaku usaha di dalam obyek wisata Palagan Ambarawa. Kemudian aspek politik mendukung berjalannya kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kolaborasi antara pihak eksekutif

dan pihak legislatif dalam menerbitkan peraturan daerah terkait pengembangan pariwisata. Selain itu juga adanya bantuan anggota dewan, dalam menyampaikan aspirasi masyarakat ke tingkat provinsi maupun pusat. Sehingga dapat mendatangkan anggaran untuk dilakukan pengembangan pariwisata.

Sementara itu aspek ekonomi menjadi kendala dalam berjalannya pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang. Hal tersebut dikarenakan selama masa pandemi Covid-19 memaksa dilakukannya penutupan obyek wisata Palagan Ambarawa. Penutupan tersebut berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perekonomian di sekitar obyek pariwisata. Kondisi lingkungan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap implementasi pengembangan pariwisata di Palagan Ambarawa. Apabila kondisi ekonomi masyarakat baik maka akan banyak wisatawan yang berkunjung, namun sebaliknya bila kondisi ekonomi masyarakat buruk maka minat masyarakat untuk berwisata akan menurun, apalagi selama pandemi obyek wisata

Palagan Ambarawa juga sempat ditutup. Sehingga hal tersebut akan berdampak kepada menurunnya jumlah wisatawan dan menurunnya pendapatan daerah di sektor pariwisata.

B. Faktor yang menghambat implementasi

Faktor yang menghambat pelaksanaan pengembangan pariwisata tersebut diantaranya adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi. Sedangkan pada karakteristik organisasi, sikap para pelaksana dan lingkungan sosial & politik tidak menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata. Berikut adalah analisis faktor penghambat implementasi :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Terdapat perbedaan persepsi antar pelaksana terkait pedoman pelaksanaan pengembangan pariwisata. Hal tersebut dikarenakan tidak semua pelaksana mengetahui tentang kebijakan pengembangan pariwisata. Kemudian juga pada saat menjalankan kebijakan tersebut sedang terjadi pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi berjalannya pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang.

Sehingga tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut tidak dapat tercapai.

2. Sumber Daya

Masih kurangnya jumlah personel atau petugas dalam melaksanakan pengembangan pariwisata, baik pada Dinas Pariwisata maupun yang berada di Palagan Ambarawa. Kemudian ketersediaan dana dalam pengembangan pariwisata yang belum mencukupi, apalagi dengan adanya pandemi yang memaksa dilakukannya *refocussing* anggaran untuk kebutuhan lainnya yang lebih mendesak. Selain itu juga masih terdapat masalah dan kekurangan pada fasilitas pendukung wisata lainnya, seperti kurang bersihnya toilet dan matinya air di toilet, serta tidak adanya atap di parkir untuk melindungi kendaraan wisatawan.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Faktor yang menghambat komunikasi adalah adanya perbedaan pendapat antara koordinator lapangan sebagai pengelola obyek wisata Palagan Ambarawa dengan kepala UPTD Dinas Pariwisata. Bahwa terdapat aspirasi yang diajukan oleh pengelola obyek wisata Palagan Ambarawa untuk dilakukan penambahan fasilitas ruangan rapat,

namun hingga saat penelitian ini dibuat ruangan tersebut belum disediakan oleh Dinas Pariwisata.

4. Lingkungan Ekonomi

Pada lingkungan ekonomi masih terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang. Hal tersebut dikarenakan kondisi pandemi, menyebabkan ditutupnya obyek pariwisata dan menurunnya pendapatan masyarakat. Akibatnya jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan dan pendapatan daerah di sektor pariwisata juga menurun.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan. Ditunjukkan dengan belum tercapainya tujuan dan sasaran dari kebijakan pengembangan pariwisata, antara lain seperti meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata. belum tercapainya tujuan dan sasaran tersebut disebabkan karena adanya pandemi Covid-19.

Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan pariwisata di Palagan Ambarawa, antara

lain seperti adanya perbedaan persepsi antar pelaksana kebijakan, kurangnya jumlah tenaga kerja, kurangnya anggaran, kurang baiknya kualitas sarana dan prasarana di Palagan Ambarawa, serta adanya pandemi Covid-19 yang sangat menghambat pelaksanaan pengembangan pariwisata dan berdampak langsung kepada pencapaian target dan sasaran kebijakan.

SARAN

- 1) Pegawai antar bidang pada Dinas Pariwisata harus memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan kebijakan pengembangan pariwisata. Pedoman kebijakan harus disosialisasikan kepada para pegawai dan pelaksana yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, agar mereka mengetahui dasar pelaksanaan pengembangan pariwisata, sehingga akan tercipta persepsi yang sama di antara pegawai dan pelaksana yang terlibat dalam pengembangan pariwisata.
- 2) Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata harus bisa menerapkan protokol kesehatan yang ketat di obyek wisata Palagan Ambarawa. Agar wisatawan bisa berkunjung dan aktivitas kepariwisataan bisa berjalan kembali. Kemudian juga perlu dilakukan pengawasan dan pengecekan lebih lanjut terhadap pengunjung yang akan masuk Palagan Ambarawa. Agar wisatawan bisa mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, sehingga bisa tercipta kawasan yang sehat.
- 3) Dinas Pariwisata bisa melakukan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dalam hal penambahan tenaga kerja. Sehingga tenaga kerja yang didapatkan bisa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh Dinas Pariwisata.
- 4) Dinas Pariwisata bisa menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta yang *profit oriented* seperti pabrik-pabrik besar yang ada di Kabupaten Semarang. Sebagai contoh seperti pabrik Sido Muncul dan pabrik Nissin. Kerjasama dengan perusahaan yang *profit oriented* bisa dilakukan agar proses pengembangan pariwisata tetap bisa berjalan.
- 5) Perlunya penambahan daya tarik wisata agar semakin menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Palagan Ambarawa. Seperti menambahkan ruangan untuk menyaksikan film dokumenter perjuangan. Selain itu pada museum yang ada di Palagan Ambarawa, perlu disediakan informasi tambahan, khususnya pada alat-alat perang yang ada di museum tersebut, agar pengunjung bisa mengetahui sejarah

dari peninggalan dan penggunaan peralatan-peralatan perang tersebut.

- 6) Perlunya melakukan penambahan sarana dan prasarana seperti kantin untuk berjualan UMKM lainnya, sehingga kantin yang ada tidak hanya 1 saja dan dapat memenuhi kebutuhan wisatawan ketika berada di Palagan Ambarawa.
- 7) Perlu dilakukan koordinasi secara intens, agar segala sesuatu yang dibutuhkan oleh koordinator lapangan Palagan Ambarawa bisa direalisasikan oleh Dinas Pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Isdarmanto. (2017). *Dasar-Dasar Kepariwisata dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta : Gerbang Media Aksara.
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Nawawi, I. (2009). *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Putra Media Nusantara (PMN).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Yohanes Sulistyadi, Y., Fauziah Eddyono, F., & Derinta Entas, D. (2019). *Indikator Perencanaan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Zaenuri, M. (2012). *Perencanaan Strategis Kepariwisata Daerah: Konsep dan Aplikasi*. *Jogjakarta: e-gov Publishing*.

Jurnal :

- Afni, I. N., & Pambudi, A. (2017). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Wonosobo*. *Adinegara*, 6(4), 393–401.
- Delly, Anwar, F., & Patrisia, N. E. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu*. *Jurnal Manajemen Publik*, 1(September), 27–41.
- Ekel, A. F. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata Di Kecamatan Modinding Kabupaten Minahasa Selatan*. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(92).
- Feki Lahamadi, Martha Ogotan, V. Y. L. (2015). *Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmaera Utara)* Feki Lahamadi Martha Ogotan. 1–14.
- Herbasuki; Warsono, H. (2017). *Sinergi Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Semarang*. *Prosiding Seminar Dan Call for Paper FISIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 205–214.
- Hura, M. A. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Kawasan Soziona Kabupaten Nias*.

- Irawan, A. (2017). Implementation of Tourism Sector Development Policy through Demarketing in Improving SME in Banyuwangi. *International Journal of Social and Local Economic Governance*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2017.003.01.1>
- Munir, U., Dimiyati, K., & Absori, A. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Pulau Lombok. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(2), 128–137. <https://doi.org/10.33319/yume.v4i2.13>
- Nugroho, S. B. M. (2020). Beberapa Masalah dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Indonesia. *Jurnal Pariwisata*, 7(2), 124-131
- Nurseptiani, D., & Mustam, M. (2016). Strategi Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 391–396. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v2i2.209>
- Pallewa, A. (2016). Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Katalogis*, 4(7), 181–192.
- Qodriyatun, S. N. (2019). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(2), 240–259. <https://doi.org/10.46807/inspirasi.v9i2.1110>
- Wicaksana, H. (2019). *Policy Of Tourism Development In Sawarna Village Lebak District Banten Province*. 367(ICDeSA), 236–241. <https://doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.48>
- Widodo, A. A., & Lestari, H. (2016). Strategi Pengembangan Pariwisata Kabupaten Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 543–559.
- Widyanarko, O. (2020). Implementasi Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Yang Berkelanjutan Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 51–55.
- Regulasi :**
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Kabupaten Semarang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Semarang Tahun 2020-2025.
- Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Semarang Tahun 2019.
- Surat Edaran Bupati Nomor 440/003910/2020 tentang Protokol Kesehatan pada Sektor Usaha Pariwisata di Kabupaten Semarang.
- Website :**
- Hadi, Rakhmat. (2021). Wisata Asean Kelam. [Wisata ASEAN Kelam \(republika.id\)](https://www.republika.id) (diakses pada 18 Maret 2022).